

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Syaiful bahri (2016:2), akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan (Agie Hanggara, 2019:1)

Menurut Ibrahim (2016:19) akuntansi sebagai berikut:

“...suatu suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisisan, dan pelaporan. Akuntansi disebut sebagai proses karena akuntansi memiliki input yang diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan output.”

Berdasarkan dari definisi;definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian pengambilan keputusan bisnis akuntansi yang memiliki input untuk diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan output.

2.1.1.2 Fungsi Akuntansi.

Menurut Sri Wahyuni Nur (2020:2), terdapat lima fungsi utamanya yaitu:

1. Sebagai tolak ukur perusahaan
Fungsi akuntansi sebagai tolak ukur perusahaan berarti bahwa setiap transaksi perusahaan yang dicatat dan dilaporkan secara akuntansi harus baik dan benar.
2. Sebagai sistem informasi
Fungsi akuntansi sebagai informasi merujuk pada laporan keuangan yang harus memberi manfaat bagi para pengambil keputusan mengenai kondisi perusahaan saat itu.
3. Perhitungan dalam pembayaran pajak
Pajak perusahaan wajib dibayarkan agar perusahaan tidak ditutup izin usahanya oleh pemerintahan.
4. Penetapan aktivitas perusahaan
Fungsi akuntansi sebagai penetapan aktivitas perusahaan berpegang teguh dengan laporan keuangan agar perusahaan bisa mengalokasikan sumber dana untuk keperluan membayar utang jangka pendek dan jangka Panjang serta kebutuhan lainnya.
5. Menghitung laba atau rugi perusahaan
Fungsi akuntansi bagi perusahaan bisa untuk mengukur pencapaian keuntungan yang sudah ditargetkan setiap tahun.
6. Sebagai pengendalian investor
Fungsi akuntansi sebagai pengendali investor dapat diketahui dari semua pencatatan transaksi keuangan

2.1.1.3 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Agie Hanggara (2019:5-7) bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 8 (delapan) bagian yaitu:

1. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting)
Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) adalah bidang akuntansi yang memiliki kegiatan seperti mencatat semua kegiatan financial yang berkaitan dengan akuntansi atau yang sudah di khususkan untuk memproses pencatatan ekonomi secara keseluruhan seperti pencatatan transaksi keuangan hingga penyajian data yang sudah menjadi bentuk laporan keuangan perusahaan.
2. Akuntansi Pemeriksaan (Auditing)
Akuntansi pemeriksaan (auditing) adalah bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari hasil

yang telah di catat dan laporan keuangan dari suatu badan, laporan bisa dari perusahaan dan bisa juga dari pemerintah.

3. Akuntansi Manajemen (Management Accounting)
Akuntansi Manajemen (Management Accounting) adalah salah satu bidang akuntansi yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi yang berkaitan kepada manajemen dalam menjalankan suatu usahanya.
4. Akuntansi Biaya (Cost Accounting)
Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang mengacu pada rekaman, presentasi, dan analisis biaya produksi. Akuntansi biaya sangat berguna dalam bisnis manufaktur karena mereka memiliki proses biaya yang cukup kompleks.
5. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)
Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang berguna untuk membantu klien mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Hal ini termasuk perhitungan pajak dan persiapan pengembalian pajak.
6. Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting)
Akuntansi pemerintahan (Governmental Accounting) adalah salah satu bidang akuntansi yang digunakan untuk menerapkan dilembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintah ini memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan negara.
7. Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information System)
Akuntansi sistem informasi adalah bidang akuntansi yang melibatkan pengembangan, instalasi, implementasi, dan pemantauan prosedur yang digunakan dalam penentuan proses kedepannya. Dalam bidang akuntansi ini ada pengumpulan data serta pelaporan keuangan.
8. Akuntansi Syariah (Islamic Accounting)
Akuntansi Syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatnya. Biasanya Bank-bank Syariah menerapkan akuntansi Syariah, sifat transaksi mereka juga berbeda dari bank konvensional.

2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Muhamad Saddam (2022:1) akuntansi pajak adalah:

“Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat Pemberitahuan Tahunan”.

Thobias E. D. Tomasowa (2022:2) juga menyatakan bahwa akuntansi pajak adalah:

“Akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan”.

menurut Uswatun dkk (2022:3), akuntansi perpajakan merupakan suatu proses akuntansi berbagai aktifitas keuangan perusahaan yang berhubungan tentang perpajakan dan hasil akhirnya menjadi laporan keuangan fiskal.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, akuntansi perpajakan merupakan suatu proses akuntansi berbagai aktifitas keuangan perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat Pemberitahuan Tahunan”

2.1.1.5 Tujuan Akuntansi Perpajakan

Menurut Khas Sukma Mulya, dkk (2023:29-30), Akuntansi Perpajakan ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak untuk pajak penghasilan.
2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk pajak pertambahan nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terhutang baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.
4. Memberi peluang menggunakan beberapa keputusan pemerintah, hanya untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.

5. Sebagai dasar pertahanan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak.

2.1.1.6 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Menurut Ahmad Faisal dan Setiadi (2021:19), Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan meliputi:

1. Pengukuran dalam mata uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.
2. Kesatuan akuntansi
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.
3. Konsep kesinambungan
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep nilai historis
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode akuntansi
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep taat asas
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep konservatisme
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep realisasi
Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan
Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

2.1.1.7 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Zarah (2022: 56) Laporan Keuangan adalah:

‘ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode atau tahun buku berjalan. Tujuan penyusunan laporan keuangan ialah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam pencapaian hasilnya’.

Agung Anggoro dkk (2023:27), laporan keuangan adalah :

‘Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan Cakuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan.’

Laporan keuangan merupakan kumpulan dari informasi keuangan perusahaan yang bersangkutan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan (Faiz dan Nabella, 2017:29)

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa, Laporan Keuangan adalah hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang bersangkutan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan terjadi selama satu periode atau tahun buku berjalan.

2.1.1.8 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Agung Anggoro Seto, dkk (2023:3), tujuan laporan keuangan adalah untuk:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan meliputi harta, kewajiban, modal serta perkembangan pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam satu periode
2. Membantu pengguna informasi dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan kredit
3. Membantu pihak manajemen dalam dalam memperkirakan arus kas dimasa yang akan datang

4. Sebagai alat identifikasi sumber daya (asset, klaim atas sumber daya tersebut (kewajiban) serta sumber daya lainnya
5. Sebagai alat penilaian kinerja perusahaan.

2.1.1.9 Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019:88), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. Bersifat historis
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya Sebagian-sebagian (tidak lengkap), tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

2.1.1.10 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Paragraf 25).
2. **Relevan**

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. (Paragraf 26).

a. **Materialitas**

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Paragraf 29)

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal {reliable}. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Paragraf 31).

a. **Penyajian jujur**

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan (Paragraf 33)

b. **Substansi Mengungguli Bentuk**

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan

dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi) (Paragraf 35).

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan (Paragraf 36)

d. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal (Paragraf 37).

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (Paragraf 38).

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode

perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda (Paragraf 39).

2.1.1.11 Pihak-Pihak yang memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Nisa Novia Avien Cristy (2019:2), Pemakai informasi Akuntansi atau pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Keuangan yaitu:

1. Pihak Internal Perusahaan

Adalah pihak yang menyelenggarakan usaha dan berhubungan langsung dengan perusahaan. Yang termasuk pihak internal meliputi:

a. Manajemen

Manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi, untuk mengambil keputusan penting dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam hal profitabilitas, posisi keuangan dan arus kas. Salah satu peran utama manajemen adalah menetapkan aturan dan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk tujuan ini, manajemen menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem manajemen keuangan organisasi.

b. Pemilik (owner)

Pemilik menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan utama untuk memperoleh laba. Mereka membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui apa yang telah mereka terima atau hilang selama periode waktu tertentu. Pemilik adalah pemakai informasi akuntansi yang memutuskan Tindakan masa depan perusahaan seperti ekspansi bisnis.

c. Karyawan/Serikat Pekerja

Mereka membutuhkan informasi akuntansi hanya dikarenakan masa sekarang dan masa depan mereka dengan keberhasilan atau kegagalan perusahaan tersebut. Keberhasilan dan profitabilitas bisnis memastikan keamanan kerja, remunerasi yang lebih baik, promosi kerja dan manfaat pension

2. Pihak Eksternal Perusahaan

Adalah pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Yang termasuk pihak eksternal meliputi:

a. Investor

Investor adalah pemakai Informasi akuntansi yang actual dan potensial, investor menggunakan informasi ini untuk mengetahui bagaimana dana mereka digunakan oleh manajemen dan apa yang

diharapkan dari kinerja bisnis di masa depan dalam hal profitabilitas dan pertumbuhan. Atas dasar informasi ini, mereka memutuskan apakah akan menambah atau mengurangi investasi diperusahaan di masa depan. Investor potensial menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah perusahaan tertentu cocok untuk kebutuhan investasi mereka.

b. Kreditor

Kreditor atau pemberi pinjaman adalah individu tau Lembaga keuangan yang biasanya meminjamkan dana dan mendapatkan penghasilan Bunga atas pinjaman tersebut. Mereka adalah pemakai informasi akuntansi yang menggunakan laporan tersebut untuk menilai kinerja, arus keuangan dan meninjau jaminan yang sesuai. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang mereka pinjamkan akan dapat mengembalikan jumlah pokok serta membayar bunga yang ada.

c. Pemasok (Supplier)

Pemasok adalah individu tau organisasi yang biasanya menjual bahan mentah ke bisnis lain secara kredit. Dalam skala bisnis besar, pemasok adalah pemakai informasi akuntansi yang menggunakan laporan tersebut dengan tujuan agar mereka memiliki gambaran tentang kelayakan kredit masa depan dari perusahaan tersebut. Hal ini juga untuk memutuskan apakah mereka akan terus menyediakan pasokan barang baku pada perusahaan tersebut atau tidak.

d. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah menggunakan informasi keuangan bisnis untuk tujuan mengenakan besaran pajak yang sesuai dan sesuai peraturan yang berlaku.

e. Masyarakat Umum

Masyarakat umum juga merupakan pemakai informasi akuntansi perusahaan yang biasanya digunakan untuk kepentingan Pendidikan, riset dan parameter.

f. Pelanggan

Informasi akuntansi juga berdampak sangat penting kepada pelanggan anda. Pelanggan anda tentu ingin mengetahui tentang posisi bisnis anda saat dan pada akhirnya mereka akan membuat penilaian tentang masa depan bisnis anda.

2.1.1.12 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Alexander Thian (2022:20), urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba/rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban.
2. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu (laporan perubahan modal). Ekuitas pemilik akan bertambah dengan adanya investasi (setoran modal) dan laba bersih, sebaliknya ekuitas pemilik akan berkurang dengan adanya prive (penarikan/ pengambilan untuk kepentingan pribadi) dan rugi bersih.
3. Neraca (*Balance Sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pertanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.
4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai akhir periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statements*) merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.1.1.13 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47 (2015:9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar

menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10

(2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan

Keuangan Paragraf 49 (2014:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas.

Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

- Aktiva Lancar

“... uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pospos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.

- b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi. Piutang Wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
 - d. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - e. Piutang penghasilan atau Penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - f. Persekot atau Biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.”
- Aktiva tidak lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan).

Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a. “Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap

selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.

- c. Aktiva Tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*), adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d. Beban yang ditangguhkan (*deferred charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.”

2. Kewajiban

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban atau hutang

adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- f. Penghasilan yang diterima dimuka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.

Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- a. Hutang Obligasi
- b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- c. Pinjaman jangka panjang yang lain.”

3. Ekuitas

Menurut Faiz Zamzani & Nabella Duta Nusa (2017:20), Ekuitas adalah:

“... hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Istilah lain yang digunakan adalah *stockholder's equity* atau modal pemegang saham. Ekuitas terdiri dari modal dan laba ditahan

1. Modal dapat diperoleh dari dana pemilik perusahaan ataupun dari pelepasan saham perusahaan ke investor.
2. Laba ditahan (saldo laba) merupakan akumulasi laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan.

a. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Fahmi (2015: 99) secara umum unsur-unsur yang terkandung dalam laporan laba rugi (*income statement*) adalah:

a. Penjualan (*Sales*)

Sale (penjualan) merupakan penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai bahan pertimbangan (Siegel dan Shim). Di sisi lain penjualan menurut (Jumingan) merupakan, "Penghasilan utama dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, atau perusahaan industri berupa hasil penjualan barang atau jasa kepada pembeli, langganan, penyewa, dan pemakai jasa lainnya." Penjualan kotor dilihat sebagai *gross sales* dan penjualan bersih dilihat sebagai *net sales*. Suatu penjualan dikatakan berhasil jika harga jual barang adalah lebih tinggi dibandingkan harga produksi, atau harga beli bagi perusahaan dagang. Harga jual harus bisa menutup:

- Harga pokok barang yang dijual.
- Biaya operasi, yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi & umum, seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya asuransi, biaya komisi penjualan, biaya promosi, dan lain-lain.
- Laba yang diinginkan oleh perusahaan.

b. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)

Harga pokok penjualan merupakan harga beli atau pembuatan suatu barang yang dijual, juga disebut *cost of goods sold* (Siegel dan Shim). Pada dasarnya harga pokok penjualan sama dengan harga pokok pembelian seandainya tidak ada persediaan barang dagangan." Namun berdasarkan pada kondisi dan realita di lapangan tetap ada ditemukan barang-barang yang tersisa atau tidak terjual

semuanya. Dan barang yang tidak terjual tersebut nantinya akan menjadi persediaan (*inventory*) pada tahun selanjutnya. Mengenai harga pokok penjualan ini ada perbedaan jika kita melihat dari segi perspektif perusahaan dagang dan industri. Bagi perusahaan dagang, harga pokok penjualan adalah harga pokok barang dagangan yang dibeli yang kemudian berhasil dijual selama suatu periode akuntansi.

c. Depresiasi (*Depreciation*)

Depresiasi adalah penurunan nilai yang terjadi secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang, seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Penyusutan suatu barang bisa berbeda-beda jenisnya tergantung jenis barang tersebut dan perawatan yang dilakukan pada barang tersebut juga. Perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat dan nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Karena itu bagi suatu perusahaan biaya pemeliharaan menjadi penting, sehingga *cost* yang dialokasikan untuk pemeliharaan barang adalah memiliki tempat khusus.

d. Bunga (*Interest*)

Bunga merupakan balas jasa yang harus diberikan atas dasar kesepakatan dalam pinjaman yang diberikan. Dalam persoalan bunga biasanya dikenakan bagi mereka yang mengambil pinjaman atau keputusan kredit, seperti kredit ke perbankan. Dalam pencatatan akuntansi untuk bunga kredit dipergunakan dua bentuk yaitu cash basis dan accrual basis yang mana masing-masingnya memiliki tempatnya tersendiri, yaitu:

- 1) Cash basis. Pencatatan secara *cash* basis akan dilakukan apabila kredit tersebut pembayarannya mengalami permasalahan seperti kredit dalam pengawasan atau pantauan khusus, kredit macet, kredit yang harus dikaji ulang atau diragukan, serta kredit yang dianggap pembayarannya tidak lancar.
- 2) Accrual basis. Pencatatan secara accrual basis akan dilakukan apabila bank melihat bahwa debitur memiliki kelancaran pembayaran yang betul-betul baik.

e. Pendapatan Sebelum Pajak (*Earnings Before Tax*)

Pendapatan sebelum pajak (*earnings before tax*) merupakan laba yang terlihat atau yang diperoleh sebelum dikurangkan dengan pajak.

f. Pajak (*Tax*)

Pajak (*tax*) merupakan pembayaran yang dibebankan oleh pemerintah atas penghasilan perorangan, perusahaan, tanah, barang-barang pemberian atau sumber-sumber lainnya untuk memberikan pemasukan bagi barang umum (publik).

g. Laba Setelah Pajak (*Earnings After Tax*)

Laba setelah pajak (*earnings after tax*) merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak. Ini disebut juga dengan net income (laba bersih), atau net profit yang diterima oleh perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*).

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan.
2. Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
 - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - c. Biaya pabrik (Biaya overhead)
3. Laba kotor (*Gross profit*)
Laba kotor (*Gross profit*) adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
6. Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*) Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
7. Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
8. Laba ditahan (*Retained Earning*)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan. Menurut (Hery, 2019) pencadangan atas laba ditahan mungkin dilakukan, diantaranya adalah untuk membeli treasury stock, melunasi utang jangka panjang, melakukan pelunasan pabrik, membuka kantor cabang baru, mengatasi ketidakpastian, dan lain sebagainya. Selain dicatat dalam jurnal, peristiwa pencadangan laba ditahan ini juga umumnya perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Jurnal akan dibuat dengan cara mendebet akun laba ditahan yang tidak dicadangkan (*unappropriated retained earnings*) dan mengkreditkan akun laba ditahan yang dicadangkan (*appropriates retained earnings*).

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Menurut Faiz Zamzani & Nabella Duta Nusa (2017:26) Laporan Perubahan ekuitas yaitu:

“Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan semua perubahan dalam ekuitas pemilik untuk jangka Panjang tertentu. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan tentang dampak transaksi ekuitas pemilik selama suatu periode akuntansi. Pernyataan dalam laporan perubahan ekuitas menginformasikan saldo awal dan saldo akhir modal sehingga memberikan gambaran setiap tambahan modal yang dilakukan selama periode akuntansi.

d. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK Nomor 2 paragraf 06 (2009:3), arus kas adalah:

“... arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. “Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih.

Menurut Kuswandi (2008:141), Arus Kas Bersih = Arus Kas Masuk – Arus Kas Keluar.

Menurut Nurliah (2023:142), Arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya:

- a. Penerimaan dari langganan.
- b. Penerimaan dari piutang bunga.
- c. Penerimaan dividen .
- d. Penerimaan *refund* dari *supplier*.

Arus Kas keluar misalnya berasal dari:

- a. Kas yang di bayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual.
 - b. Bunga yang di bayar atas utang perusahaan.
 - c. Pembayaran pajak penghasilan.
 - d. Pembayaran gaji.
2. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
 3. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas.”

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:32-33) dalam laporan arus kas,

aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi 3 yaitu:

1. “Arus kas dari aktivitas operasi (*cash flow from operating activity*). Arus operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk di dalamnya:
 - a. Menjual barang atau jasa.
 - b. Pembelian barang atau jasa dari pemasok (*supplier*).
 - c. Membayar beban-beban operasi (gaji, sewa asuransi, dll).
 - d. Pembayaran pajak.
 - e. Pembayaran bunga dan hutang.
2. Arus kas dari aktivitas investasi (*cash flow from investing activity*). Aktivitas investasi adalah bagaimana melihat perusahaan menangani aset yang digunakan untuk operasinya. Misalnya penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah:
 - a. Menambah atau menjual aktiva tetap.
 - b. Membeli atau menjual anak perusahaan.
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan (*cash flow from financing activity*). Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin, sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastis. Aktivitas pendanaan berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, yang termasuk di dalamnya:
 - a. Menambah atau membayar hutang.
 - b. Menambah saham/ obligasi.
 - c. Pembayaran deviden”.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah:

“...berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan laporan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

2.1.1.14 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Menurut Pohan (2015:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak (Sartono, 2021:6).

Menurut Siti Resmi (2019:376), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

- a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
- b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
- b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis

atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.

- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
 - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pension.
 - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.

- e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
 - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 - c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
- a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - c) Pajak penghasilan.
 - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
 - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).
- a. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut

akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

- Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
 - Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
 - Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expense*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
4. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Menurut Suandy (2016:96), perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Menurut Pohan (2015:322), beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi. Beda waktu terdiri dari
- Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.
 - Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal.
 - Penyisihan kerugian piutang (*allowance for bad debts*).
 - Penyisihan kerugian persediaan.
 - Penyisihan pesangon.
 - Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga
 - Penyisihan potongan penjualan dan sebagainya.

2.1.1.15 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak) (Siti Resmi, 2019:375).

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Siti Resmi (2019:376), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan”

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut (Siti Resmi, 2019:376).

Menurut Pohan (2015:318), rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan berupa kertas yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

Menurut Siti Resmi (2019:380), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.”

Menurut Pohan (2018:318), fiskus menggunakan istilah Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif (yang sama pengertiannya dengan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif) berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.141/PJ./2004:

- a. “Penyesuaian fiskal positif
Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.
- b. Penyesuaian Fiskal Negatif
Penyesuaian Fiskal Negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dana atau menambah biaya-biaya komersial.”

Menurut Pohan (2015:319), ada dua macam koreksi fiskal yaitu:

1. “Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain:
 - a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
 - b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
 - c. Biaya yang diakui lebih kecil.
 - d. Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - e. Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
2. Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:
 - a. Biaya yang diakui lebih besar.
 - b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - c. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.”

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Shindy dan Indira (2022) menjelaskan bahwa Teori agensi telah menjadi salah satu paradigma teoritis yang penting dalam sebuah organisasi, dimana organisasi merupakan tempat persimpangan dari beberapa hubungan kontrak antara manajemen, pemilik organisasi, kreditur, dan bahkan pemerintah.

Dalam perspektif teori agensi di pengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara *agent* (perusahaan) dengan *principal* (pemerintah). *Agency theory* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kontrol yang rendah atas perusahaan untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan *agency theory*, pemerintah menginginkan pajak yang di bayarkan setara dengan laba yang dimiliki namun perusahaan berupaya untuk membayarkan beban pajaknya seminimal mungkin dengan cara melakukan penghindaran pajak (Tim Penulis Prodi Akuntansi UMM, 2022:92).

2.1.3 Teori Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Scott (2009:114) sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the asset being traded that another type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry”.

Jika diartikan, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut Scott (2009:13), asimetri informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Adverse Selection*

Is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.

2. *Moral Hazard*

Is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot.

Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungut pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Kesit Bambang Prakoso, 2014)

2.1.4 Konservatisme Akuntansi

2.1.4.1 Definisi Konservatisme Akuntansi

Menurut Suwardjono (2010:245) menyatakan bahwa:

“...Konservatisme adalah sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (outcome) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut”.

Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:23) menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi sebagai pengakuan awal biaya rugi menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Menurut Enni Savitri (2016:21), Konservatisme secara mudah dapat diinterpretasikan sebagai kehati-hatian (*prudent*) dengan kehati-hatian maka kecenderungan yang ada di dalam laporan adalah pesimisme

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa konservatisme akuntansi adalah prinsip akuntansi yang akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian

2.1.4.2 Jenis-jenis Konservatisme

Menurut Subramanyam (2010:92) konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Konservatisme Tak Bersyarat (*Unconditional Conservatism*)

Bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Contoh dari konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Beban R&D dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi ekonomis. Oleh karena itu, aset bersih dari perusahaan yang melakukan R&D secara insentif akan selalu lebih rendah (*understated*).

2. Konservatisme Bersyarat (*Conditional Conservatism*)

Mengacu kepada pepatah lama "semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi". Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PP&E atau goodwill apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya dikemudian hari, maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan hanya mencerminkan

kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dalam hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi”.

Dari kedua jenis konservatisme tersebut, jenis konservatisme tak bersyarat lah yang lebih berharga bagi analisis, terutama analisis kredit karena ia mengkomunikasikan informasi tepat pada waktunya mengenai perubahan yang merugikan dalam situasi ekonomi perusahaan yang mendasarinya.

2.1.4.3 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK

Menurut Enni Savitri (2016:25), PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah:

1. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu FIFO (*first in first out*) atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang.
2. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu aktiva didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat tersebut haruslah diteliti kembali secara periodik dan jika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari

estimasi sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong timbulnya laba yang konservatif.

3. PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.
4. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tsb akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara handal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva.

2.1.4.4 Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Watts (2003) dalam Enni Savitri (2016:45), membagi konservatisme menjadi 3 pengukuran, yaitu *Earning/Stock Return Relation Measure*, *Earning/Accrual Measures*, *Net Asset Measure*. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watt (2003):

1. *Earning/Stock Return Relation Measure*

Menurut Basu (1997) dalam Enni Savitri (2016:50), konservatisme diukur pendekatan reaksi pasar atas informasi yang diungkapkan perusahaan. Konservatisme diukur dengan cara membentuk regresi antara *return* saham terhadap laba.

$$\frac{EPS_{it}}{P_{it}} = \alpha_0 + \alpha_1 DR_{it} + \beta_0 R_{it} + \beta_1 R_{it}DR_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- EPS_{it} : *Earnings per share* untuk perusahaan i tahun t
 Pit : Harga pasar pembukaan untuk perusahaan I tahun t
 Rit : Return saham perusahaan i tahun t
 DR_{it} : 1 bila return pasar untuk perusahaan i pada tahun t adalah negatif dan 0 bila sebaliknya.
 α_0 : Intersep
 α_1 : Koefisien variabel dummy jenis periode
 β_0 : Koefisien (slop) regresi
 β_1 : Koefisien variabel interaksi return dan jenis periode
 ε_{it} : *Error terms*

2. *Earning/Accrual Measures*

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur konservatisme akuntansi menurut Givoly dan Hayn (2002) dalam Enni Savitri (2016:52), yaitu:

$$\text{CONACC} = \frac{(\text{NIO} + \text{DEP} - \text{CFO}) \times (-1)}{\text{TA}}$$

Keterangan:

CONACC : *Earnings conservatism based on accrued items*

NIO : *Net Income*

DEP : *Depreciation of fixed assets of current year*

CFO : *Net amount of cash flow from operating activities of current year*

TA : *book value of closing total assets.*

Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk

dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan (Enni Savitri 2016:47).

Menurut Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi (2016), ukuran konservatisme di atas harus dikali -1, sehingga semakin besar nilai positif rasio, maka semakin konservatif.

Apabila hasil bertanda positif, maka perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Namun bila hasil bertanda negatif, perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi (Kadek Nita Sumiari dan Dewa Gede Wirama, 2016)

3. *Net Asset Measure*

Menurut Beaver dan Ryan (2000) dalam Enni Savitri (2016:48) perhitungan *Net Asset Measures* menggunakan proksi rasio *Market to book value ratio (market value of common equity/book value common equity)*.

Rumus untuk menghitung *market to book ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Market/Book(M/B) Ratio} = \frac{\text{Market price share of common stock}}{\text{book value per share of common stock}}$$

Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya (Enni Savitri 2016:48)

Adapun komponen untuk menentukan Konservatisme Akuntansi yang terdapat dalam rumus *Earning/Accrual Measures* CONACC menurut Givoly dan Hayn (2002) yaitu depresiasi dan nilai buku penutupan total aset. Untuk komponen lainnya telah dijelaskan diatas.

1. Depresiasi

Depresiasi adalah penurunan nilai yang terjadi secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang, seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Penyusutan suatu barang bisa berbeda-beda jenisnya tergantung jenis barang tersebut dan perawatan yang dilakukan pada barang tersebut juga. Perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat dan nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Karena itu bagi suatu perusahaan biaya pemeliharaan menjadi lebih penting, sehingga *cost* yang dialokasikan untuk pemeliharaan barang adalah memiliki tempat khusus (Fahmi, 2015:100).

Faktor yang Menentukan Beban Penyusutan

Biaya penyusutan periodik harus merupakan hasil alokasi harga perolehan aktiva dikurangi dengan taksiran nilai sisanya kepada periode-periode di mana manfaat potensial aktiva tetap itu dikonsumsi, guna mendapatkan hasil alokasi yang sebanding dengan manfaat potensial yang dikonsumsi pada masing-masing periode. Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan atau yang

menentukan di dalam penentuan biaya penyusutan (Atichasari, 2023: 45), yaitu berikut ini:

1. Harga Perolehan (*Costs*)
 Harga perolehan adalah keseluruhan pengeluaran yang layak dibebankan atau dikapitalisasikan sebagai harga perolehan. Harga perolehan inilah yang akan dialokasikan sebagai biaya penyusutan periodik. Oleh karena harga perolehan ini yang akan dialokasikan maka dalam penentuan besarnya alokasi harus dilakukan perhitungan yang teliti.
2. Umur Ekonomis (*Useful-Life*)
 Umur ekonomis ialah umur suatu aktiva tetap sejak siap dipergunakan sampai pada waktu aktiva tetap tersebut secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi untuk dipergunakan terus. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan aktiva tersebut sudah melebihi atau sudah tidak seimbang lagi dengan daya guna yang dapat diberikannya. Umur ekonomis suatu aktiva tetap harus ditaksir setelah memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. Taksiran kerusakan fisik karena pemakaian.
 - b. Keusangan karena waktu.
 - c. Hukum atau pembatasan-pembatasan lain terhadap penggunaan aktiva tetap yang bersangkutan.
3. Nilai Sisa atau Nilai Residu (*Salvage Value*)
 Nilai sisa atau nilai residu ialah nilai aktiva tetap setelah habis umur ekonomisnya atau jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diberhentikan dari pemakaiannya. Nilai residu aktiva tetap yang dihapuskan akan meliputi harga penjualan yang diperkirakan atau nilai pertukaran atau nilai bekas yang tak dipakai lagi atau nilai akhir (*junk value*) jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan, dikurangi dengan biaya-biaya dari pelaksanaan penarikan aktiva tetap tersebut, seperti biaya pembongkaran, biaya lelang, biaya pemindahan, dan lain-lain. Hasil penjualan aktiva tersebut setelah diberhentikan dari pemakaiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga dan keadaan pasar serta kebijaksanaan pemberhentian aktiva dari pemakaiannya.
4. Metode Penyusutan
 Metode penyusutan adalah suatu cara yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap berwujud dialokasikan sebagai biaya operasional sepanjang umur aktiva. Di dalam kenyataannya, tidak semua aktiva tetap yang digunakan dalam operasi suatu perusahaan mengalami penyusutan atau penurunan nilai guna dengan cara yang sama. Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap cocok untuk diterapkan untuk jenis aktiva tertentu belum tentu akan cocok untuk diterapkan pada jenis aktiva

yang lain karena perbedaan sifat dan pola penggunaan aktiva-aktiva tersebut. Metode penyusutan yang dipilih hendaknya sesuai dan menggunakan sifat dan pola penggunaan aktiva tetap yang akan di susut. Begitu pula, prinsip konsistensi harus diperhatikan dalam pemilihan metode penyusutan yang akan dipilih untuk digunakan.

Macam-Macam Metode Depresiasi

Menurut Atichasari (2023: 48) metode depresiasi merupakan suatu yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap dialokasikan. Oleh karena itu, agar alokasi harga perolehan sebagai pengakuan biaya bisa mendekati tepat maka harus digunakan metode depresiasi yang sesuai dengan pola pemakaian aktiva tetap yang bersangkutan.

Ada beberapa metode depresiasi yang biasa digunakan dan perlu Anda ketahui (Atichasari, 2023: 49), yaitu berikut ini.

1. Depresiasi yang dihitung berdasarkan aktivitas aktiva tetap (Metode Aktivitas).
Metode Aktivitas Suatu aktiva tetap yang di depresiasi berdasarkan aktivitas penggunaannya, metodenya disebut dengan metode aktivitas (activity method). Metode aktivitas menggunakan pendekatan pembebanan variabel dengan asumsi bahwa depresiasi merupakan fungsi dari produksi. Dalam metode aktivitas, umur ekonomis aktiva tetap diukur berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah unit produk yang mampu diberikan oleh aktiva tetap tersebut. Secara konseptual, metode ini paling mendekati ketepatan terhadap pola pemakaian aktiva tetap sehingga apabila dapat diketahui kemampuan suatu aktiva tetap dalam memberikan manfaat ekonomis selama pemakaiannya dan bisa ditentukan berapa banyak penggunaan manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut untuk satu periode maka akan dapat ditentukan secara tepat besarnya alokasi harga perolehan aktiva tetap untuk satu periode tersebut
2. Metode Garis Lurus (Straight-Line Method)
Metode garis lurus dipakai untuk mendepresiasi suatu aktiva tetap apabila diperkirakan bahwa aktiva tetap tersebut memberikan manfaat ekonomis yang relatif sama besarnya untuk setiap periode selama masa penggunaannya. Umur ekonomis yang digunakan pada metode garis lurus dihitung atas dasar umur (masa pakai) aktiva tetap yang

bersangkutan. Metode garis lurus ini menganggap depresiasi sebagai fungsi dari waktu

3. Depresiasi dengan pembebanan yang menurun.
 Depresiasi Dengan Pembebanan Yang Menurun Metode depresiasi yang lazim digunakan untuk pembebanan depresiasi yang menurun ada 2, yaitu berikut ini.
 - a. Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of The Year's Digits Method)
 Dengan menggunakan metode ini, suatu aktiva tetap di susut dengan jumlah yang semakin mengecil. Depresiasi per tahun dihitung sebesar proporsi antara Sisa Umur Penggunaannya dari Nilai Penjumlahan Umur Penggunaan Aktiva Tetap terhadap bagian harga perolehan aktiva tetap tersebut
 - b. Metode persentase tetap dari nilai buku (Metode Saldo yang Menurun/Declining Balance Method)
 Metode saldo yang menurun dalam metode saldo yang menurun, depresiasi suatu aktiva tetap dihitung sebesar persentase tertentu dari nilai bukunya pada awal tahun.

2. Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi atas pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap yang tidak berwujud atau pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun (Setu Setyawan, 178:2022)

3. Depleksi

Selain aset tidak berwujud yang telah dibahas di atas, perusahaan juga dapat memperoleh aset untuk mengelola sumber daya alam berupa pemanfaatan atau penggalan. Contoh hak penguasaan hutan, hak untuk menambang minyak dan gas bumi. Biaya untuk memperoleh hak tersebut setiap periode akan berkurang sebagai akibat pemanfaatan atau penggalan sumber daya. Pembebanan biaya semacam ini disebut dengan istilah depleksi. Depleksi pada dasarnya dapat disamakan dengan penyusutan pada aset tetap (Zainal Arifin, 2009:149).

2.1.5 *Financial Distress*

2.1.5.1 Definisi *Financial Distress*

Kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan (Rudianto 2013:251).

Plat dan Plat dalam Irham Fahmi (2015:158) mendefinisikan *Financial Distress* sebagai:

“...tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial Distress* dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas

Financial Distress merupakan kondisi suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi berbagai kewajiban kepada pihak lain seperti kreditur, kewajiban kepada pemegang obligasi, dan lain-lain dapat berujung pada kebangkrutan (Gita dan Francis 2020:27)

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* adalah kondisi suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi berbagai kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas pada saat jatuh tempo. Keadaan ini apabila tidak di atasi akan berujung pada kebangkrutan.

2.1.5.2 Kategori *Financial Distress*

Menurut Irham Fahmi (2015:159), untuk persoalan *Financial Distress* secara kajian umum ada 4 (empat) kategori penggolongan yang bisa kita buat, yaitu:

- a. **Pertama**, *Financial Distress* kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit). Dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
- b. **Kedua**, *Financial Distress* kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.
- c. **Ketiga**, *Financial Distress* kategori C atau sedang, dan ini dianggap perusahaan masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan Tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal. Namun di sini perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam menggenjot perolehan laba kembali. Dimana salah satu tugas manajer baru tersebut adalah jika perolehan laba telah kembali diperoleh maka jika perusahaan pernah melakukan keputusan penjualan saham, maka memungkinkan dana keuntungan yang diperoleh tersebut dialokasikan Sebagian untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada public atau yang dikenal dengan istilah *stock repurchase* atau *buy back*. Keputusan untuk membeli kembali saham yang sudah dijual kepasar mengandung berbagai arti bagi suatu perusahaan
 - 1) Perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di pasaran;
 - 2) Perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasaran, bahwa memiliki kemampuan finansial yang cukup;
 - 3) Diharapkan dengan membeli saham, *Earning pershare* akan mengalami kenaikan; dan

- 4) Dengan terjadinya peningkatan *Earning pershare* (EPS) diharapkan *market price pershare* juga akan mengalami kenaikan.
- d. **Keempat**, *Financial Distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya bersifat jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti dengan mengeluarkan *financial reserve* (cadangan keuangan) yang dimiliki, atau mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini memang dialokasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan biasanya jika ini terjadi pada anak perusahaan (*subsidiaries company*) maka itu bisa diselesaikan secara cepat tanpa harus ada penanganan serius dari pihak manajemen kantor pusat (*head office management*)

2.1.5.3 Manfaat diharapkan Informasi Kebangkrutan

Menurut Rudianto (2013:253), Informasi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Manajemen

Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa dilakukan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan dihilangkan atau diminimalkan. Langkah pencegahan kebangkrutan yang merupakan tindakan akhir penyelamatan yang dapat dilakukan bisa berupa merger atau restrukturisasi keuangan.

2. Pemberi Pinjaman (Kreditor)

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai kreditor untuk mengambil keputusan mengenai diberikan-tidaknya pinjaman kepada perusahaan tersebut. Pada langkah berikutnya, informasi tersebut berguna untuk memonitor pinjaman yang telah diberikan.

3. Investor

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan

investor berniat membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah dideteksi kemungkinan kebangkrutannya, maka perusahaan calon investor itu dapat memutuskan membeli atau tidak surat berharga yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

4. Pemerintah

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah bertanggung jawab mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal.

5. Akuntan Publik

Akuntan publik perlu menilai potensi keberlangsungan hidup badan usaha yang sedang diauditnya, karena akuntan akan menilai kemampuan *going concern* perusahaan tersebut.

2.1.5.4 Penyebab *Financial Distress*

Menurut Rudianto (2013:252), secara umum, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Karena itu, penting sekali memahami berbagai jenis kegagalan yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Terdapat tiga jenis kegagalan dalam perusahaan, yaitu:

- a. Perusahaan yang menghadapi *technically insolvent*, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo tetapi nilai aset perusahaan lebih tinggi daripada utangnya.
- b. Perusahaan yang menghadapi *legally insolvent*, jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan.
- c. Perusahaan yang mengalami kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit.

Secara umum, penyebab utama kegagalan sebuah perusahaan adalah

manajemen yang kurang kompeten. Tetapi penyebab umum kegagalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling terkait satu dengan lainnya. Pada prinsipnya, penyebab kegagalan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor Internal

Kurang kompetennya manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Kesalahan dalam mengambil keputusan akibat kurang kompetennya manajemen yang dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan, meliputi faktor keuangan maupun nonkeuangan.

Kesalahan pengelolaan di bidang keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan.
- b. Adanya “*current liabilities*” yang terlalu besar di atas “*current assets*”.
- c. Lambatnya penagihan piutang atau banyaknya “*bad debts*” (piutang tak tertagih).
- d. Kesalahan dalam “*dividend policy*”.
- e. Tidak cukupnya dana-dana penyusutan.

Kesalahan pengelolaan di bidang nonkeuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan.
- b. Kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan.
- c. Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan.
- d. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan.
- e. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan.
- f. Kesalahan dalam kebijakan pembelian.
- g. Kesalahan dalam kebijakan produksi.
- h. Kesalahan dalam kebijakan pemasaran.
- i. Adanya ekspansi yang berlebih-lebihan.

2. Faktor Eksternal

Berbagai faktor eksternal dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah perusahaan. Penyebab eksternal adalah berbagai hal yang timbul atau berasal dari luar perusahaan dan yang berada di luar kekuasaan atau kendali pimpinan perusahaan atau badan usaha, yaitu:

- a. Kondisi perekonomian secara makro, baik domestik maupun internasional.
- b. Adanya persaingan yang ketat.
- c. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya.
- d. Turunnya harga-harga dan sebagainya.

2.1.5.5 Metode Pengukuran Financial Distress

2.1.5.5.1 Analisis Altman Z-Score

Rudianto (2013:254) menyatakan bahwa, Analisis *Z-Score* adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Itu berarti, dengan metode *Z-Score* dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan.

Rumus *Z-Score* pertama dihasilkan Altman pada tahun 1986. Rumus ini dihasilkan dari penelitian atas berbagai perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang menjual sahamnya di bursa efek. Karena itu, rumus tersebut lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public*. Rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Keterangan:

X_1 = Modal Kerja dibagi dengan Total Aset

X_2 = Laba Ditahan dibagi dengan Total Aset

X_3 = EBIT dibagi dengan Total Aset

X_4 = Nilai Pasar Saham dibagi dengan Total Utang

X_5 = Penjualan dibagi dengan Total Aset

Karena skor yang diperoleh merupakan gabungan dari 5 unsur yang berbeda, di mana setiap unsur merupakan rasio keuangan yang berbeda, maka sangat

penting untuk memahami makna dari setiap unsur tersebut. Definisi dari diskriminasi

Z (zeta) adalah;

a. Rasio X_1 (Modal Kerja : Total Aset)

Mengukur likuiditas dengan membandingkan aset likuid bersih dengan total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (aset lancar – utang lancar). Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan turun lebih cepat ketimbang total aset sehingga menyebabkan rasio ini turun. Rasio ini dapat dicari dengan rumus:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

b. Rasio X_2 (Laba Ditahan : Total Aset)

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan kecepatan perputaran *operating assets* sebagai ukuran efisiensi usaha atau dengan kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi.

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

c. Rasio X_3 (EBIT : Total Aset)

Rasio ini mengukur profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian atas aset, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Tax*) tahunan perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi kewajiban bunga para investor.

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

d. Rasio X₄ (Nilai Saham : Total Utang)

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang per modal sendiri (*DER = Debt To Equity Ratio*) yang lebih terkenal. Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar modal sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan dikalikan dengan pasar saham per lembar sahamnya (jumlah lembar saham x harga pasar saham per lembar). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasikan lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri.

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Pasar Saham}}{\text{Total Utang}}$$

e. Rasio X₅ (Penjualan : Total Aset)

Rasio ini mengukur kemampuan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Nadiah Vardah Varassah (2018), setelah didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan model persamaan Altman *Z-Score*, maka akan disesuaikan dengan kriteria penilaian atau titik *cut off* sebagai berikut:

1. $Z \geq 2,99$ = Perusahaan tidak Mengalami *Financial Distress*
2. $1,81 \leq Z < 2,99$ = Perusahaan berada di zona rawan (*Grey Area*) dan perusahaan harus waspada.
3. $Z < 1,81$ = Perusahaan mengalami *Financial Distress*

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara.

Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak *go public*.

Karena itu, rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di bursa efek.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak *go public*, sebagai berikut:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Keterangan:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus *Z-Score* tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur *non go public*. Untuk itu Altman kembali melakukan penelitian di Mexico (negara berkembang) dengan harapan bahwa rumus *Z-Score* dapat digunakan dalam perusahaan *go public* maupun *non go public*.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan

lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

1. $Z > 2,9$ = Zona Aman (Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi)
2. $1,23 < Z < 2,9$ = Zona Abu-abu (Perusahaan dalam kondisi rawan (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat.
3. $Z < 1,23$ = Zona Berbahaya (Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang tinggi)

Setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan manufaktur dan menghasilkan 2 rumus pendeteksi kebangkrutan, Altman tidak berhenti. Altman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang *go public* maupun yang tidak. Rumus *Z-Score* terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang *go public* maupun yang tidak, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia.

Pada model terakhir ini rasio *sales to total asset* dihilangkan dengan harapan dampak industri – dalam pengertian ukuran perusahaan terkait dengan aset atau penjualan – dapat dihilangkan.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* ketiga untuk berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

1. $Z > 2,6$ = Zona Aman (Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi)
2. $1,1 < Z < 2,6$ = Zona Abu-abu (Perusahaan dalam kondisi rawan (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat

3. $Z < 1,1$ = Zona Berbahaya (Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang tinggi).

2.1.5.5.2 Analisis Springate Score

Menurut Rudianto (2013:262), Springate Score adalah metode untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dengan diberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi, dengan metode *Springate Score* dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan.

Untuk menentukan rasio-rasio mana saja yang dapat mendeteksi kemungkinan kebangkrutan, Springate menggunakan MDA untuk memilih 4 rasio dari 19 rasio keuangan yang populer dalam literatur-literatur, yang mampu membedakan dengan baik antara sinyal usaha yang pailit dan tidak pailit.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Springate Score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut:

$$S = 1,03X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4$$

Keterangan:

X_1 = Modal Kerja/Total Aset

X_2 = EBIT/Total Aset

X_3 = EBT/Utang Lancar

X_4 = Penjualan/Total Aset

2.1.5.5.3 Analisis Zmijewski

Menurut Rudianto (2013:264), Zmijewski Score adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan umum yang memberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya.

Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas perusahaan untuk model prediksi kebangkrutan yang dibangunnya. Model ini menekankan pada jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Zmijewski Score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut:

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004X_3$$

Keterangan :

$X_1 = \text{Net Income/Total Assets}$

$X_2 = \text{Total Liabilities/Total Asset}$

$X_3 = \text{Current Assets/Current Liabilities}$

Salah satu komponen yang menentukan *Financial Distress* yang terdapat dalam rumus Altman Z-Score pertama menurut Rudianto (2013:254) adalah Modal Kerja dan Nilai Pasar Saham. Untuk komponen lainnya telah dijelaskan diatas.

1. Modal Kerja

Menurut Agung Anggoro, dkk (2023:121), Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan membayar utang jangka pendek. Modal kerja juga dapat digunakan untuk menjaga likuiditas perusahaan dan membiayai investasi jangka pendek. Modal kerja

merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang menunjukkan seberapa banyak dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai operasi harian dan memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek. Modal kerja dihitung dengan mengurangi aktiva lancar dengan utang lancar. Semakin besar modal kerja, semakin baik likuiditas perusahaan dan semakin kuat kemampuannya untuk mengatasi darurat keuangan. Oleh karena itu, modal kerja harus dipertahankan pada tingkat yang memadai.

Jenis-jenis modal kerja menurut Ahmad Bairizki dkk (2022:167)

1. Modal kerja permanen, modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di perusahaan agar dapat menjalankan setiap kegiatan dalam satu periode akuntansi.
 - a. Modal kerja primer (*primary working capital*), modal kerja yang minimal harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin perusahaan dapat beroperasi.
 - b. Modal kerja normal (*normal working capital*), modal kerja yang wajib dan harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal.
2. Modal kerja variabel (*variable working capital*), modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode.
 - a. Modal kerja musiman (*seasonal working capital*), yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim.
 - b. Modal kerja darurat (*emergency working capital*), yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya.
 - c. Modal kerja siklus (*cyclical working capital*), yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk.

2. Nilai Pasar Saham

Menurut Ari Agung Nugroho, dkk (2022:84), berikut ini beberapa nilai yang berhubungan dengan saham yaitu:

1. Nilai Buku (*Book Value*)

Nilai buku (*book value*) merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai buku ditentukan berdasarkan akuntansi, yaitu berdasarkan total aktiva dikurangi total hutang.

2. Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai Pasar (*market value*) merupakan nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Nilai pasar saham berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual di pasar, maka nilai pasar adalah harga saham

yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar tergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran.

3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)

Nilai intrinsik dapat didefinisikan sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham, dengan kata lain nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya.

Menurut Widodoatmojo (2005:54) dalam Ari Agung Nugroho, dkk (2022:81), Adapun jenis-jenis harga saham adalah sebagai berikut:

1. Harga Nominal

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

2. Harga Perdana

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwrite*) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.

3. Harga Pasar

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

4. Harga Pembukaan

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi.

5. Harga Penutupan

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau yang ini terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.

6. Harga Tertinggi

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak ada pada harga yang sama.

7. Harga Terendah

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi.

8. Harga Rata-Rata

Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah pada satu periode.

Menurut Fahmi (2015:53), ada beberapa pengertian saham adalah:

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap untuk dijual.

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh public yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preference stock*). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing-masing (Fahmi, 2015:54).

1. *Common Stock* (saham biasa)

Common stock (saham biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Secara lebih tegas Skousen, Stice, dan Stice Mengatakan, "Para pemegang saham biasa merupakan para pemilik riil perusahaan (korporasi) ini: mereka memiliki hak pilih (vote) atas dewan direktur dan memiliki kepemilikan legal aktiva perusahaan setelah tuntutan (claim) semua kreditor dan para pemegang saham preferen dipenuhi." Common stok ini memiliki beberapa jenis yaitu:

- a) *Blue Chip-Stock* (Saham Unggulan). Adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan management yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du Pont merupakan contoh blue chip.
- b) *Growth Stock*. Adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi.
- c) *Defensive Stock* (saham-saham defensif). Adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja

pasar). Contoh perusahaan yang masuk kategori ini biasanya perusahaan yang produknya memang dibutuhkan oleh publik seperti perusahaan yang masuk kategori food and beverage, yaitu produk gula, beras, minyak makan, garam dan sejenisnya.

- d) *Cyclical Stock*. Adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik mobil dan real estate. Sebaliknya saham non siklis mencakup saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalnya makanan dan obat-obatan.
- e) *Seasonal Stock*. Adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim natal.
- f) *Speculative Stock*. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak.

2. *Preferred Stock* (saham istimewa)

Preferred Stock (saham istimewa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan).

Menurut Ari Agung Nugroho, dkk (2022:79), harga saham adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Investor senantiasa mengamati pergerakan harga saham selama periode tertentu yang dijadikan sampel pada saat penutupan harga pasar saham.

2.1.6 Pajak

2.1.6.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Humaidah dkk (2023:), pajak adalah:

“...iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional”.

Mustaqiem (2014:30), pajak adalah:

“...iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan”.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Wico J Tarigan dkk (2023:39) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak berfungsi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Regulered (Pengatur)
Pajak berfungsi sebagai pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.6.3 Jenis Pajak

Menurut Wico J Tarigan dkk (2023:40), ada beberapa jenis pajak Menurut sifat nya dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, dimana pajak ini diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak tambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif. Kedua jenis pajak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.
- b. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak.

2.1.6.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Wico J Tarigan dkk (2023:33), secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada tiga cara yaitu:

1. *Official Assesment System*
Official Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparaturnya pajak, dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya pajak, hutang baru timbul bila sudah ada SKP dari aparaturnya pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparaturnya pajak.
2. *Self Assesment System*
Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak, dalam sistem ini Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali Wajib Pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada Wajib Pajak.
3. *Withholding System*
Withholding System yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan objek pajak yang terkait dengan transaksinya dengan pihak lain dan menentukan besarnya pajak yang harus dipotong atau dipungutnya sesuai dengan objek pajak tersebut serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak yang berwenang melakukan pemotongan/pemungutan.

2.1.6.5 Tarif Pajak

Menurut Syahrul dan Ady (2020: 117), terdapat beberapa jenis tarif pajak :

1. Tarif Pajak Progresif (*progressive tax rate*)
 Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:
 - a) Tarif pajak Progresif Progresif
 Tarif pajak progresif progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik
 - b) Tarif pajak Progresif Proporsional
 Tarif pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.
 - c) Tarif pajak Progresif Degresif
 Tarif pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.
2. Tarif Pajak Degresif (*degressive tax rate*)
 Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah Ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan bisa lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
3. Tarif Proporsional (*proportional flat tax rate*)
 Tarif proporsional adalah tarif yang menggunakan persentase tetap terhadap beberapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, itu berarti persentase dalam tarif proporsional selamanya tetap sama sekalipun nilai objek pajak terbilang tinggi. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerapkan tarif proporsional pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Tarif Tetap/Regresif (A Fixed Tax Rate)

Tarif Pajak tetap adalah pajak yang nominalnya tetap terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Seperti Bea Materai adalah contoh diterapkannya tarif tetap.

5. Tarif Advalorem

Tarif pajak Advalorem merupakan tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan pada harga suatu barang

6. Tarif Spesifik

Tarif pajak spesifik merupakan tarif pajak dengan jumlah tertentu yang dikenakan pada satuan jenis barang tertentu atau suatu jenis barang tertentu.

2.1.6.6 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27), penghindaran pajak yaitu :

“... Tax Avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal”.

Menurut Titi Muswati Putranti dkk (2015:10) Penghindaran pajak adalah upaya Wajib Pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan manajemen perusahaan dalam mengurangi atau memperkecil proporsi beban pajak yang dibayarkan dengan tanda menyalahi undang-undang perpajakan yang berlaku, hal ini dilakukan agar laba bersih yang didapatkan perusahaan meningkat (Aloisius Hama, 2020:8).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah salah satu strategi yang dapat digunakan manajemen perusahaan dalam mengurangi atau memperkecil proporsi beban pajak dengan Pajak memanfaatkan celah hukum.

2.1.6.7 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Alexander Thian (2021:20) Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Menahan Diri
Yang dimaksud dengan menahan diri, yaitu Wajib Pajak tidak melakukan sesuatu dengan pajak. Contohnya adalah:
 - a. Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau
 - b. Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut. Sebagai gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastic.
2. Pindah Lokasi
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tingginya ke lokasi yang pajaknya rendah. Sebagai contoh adalah diberikannya keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian Timur. Namun, pindah lokasi ini tidak semudah itu dilakukan oleh Wajib Pajak. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, sumber daya manusia, sumber daya alam. Serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan dan keringan pajak yang mereka peroleh. Biasanya, hal ini jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah para pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.
3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis
Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Celah undang-undang merupakan dasar potensial bagi penghindaran pajak secara yuridis.

2.1.6.8 Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135), terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak, yaitu:

Tabel 2. 1
Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwide total income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\textit{Worldwide current income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\textit{Worldwide cash taxes paid}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-Run Cash ETR	$\frac{\Sigma(\textit{Worldwide cash taxes paid})}{\Sigma(\textit{Worldwide total pretax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR

		<i>an firm's GAAP ETR</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential*Pre-tax book income = a + bControls + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
Total BTD	<i>Pretax book income – ((U.S. CTE+ Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOL_t - NOL_{t+1})</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S. STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
Abnormal total BTD	<i>Residual from $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$</i>	<i>A measure of unexplained total booktax difference</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm</i>

		<i>disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Ada berbagai macam jenis pengukuran penghindaran pajak yang telah diuraikan di atas, namun dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135) sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Net income before tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

Cash Tax Paid = Pembayaran Pajak

Net Income Before Tax = Laba Sebelum Pajak

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%, perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25% (<25%) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari sama dengan 25% (≥25%), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Adapun menurut Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1(b) tarif pajak yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2020-2022 sebesar 22%, perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 22% (<22%) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari sama dengan 22% (≥ 22), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

2.1.6.9 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia tahun 2010-2019 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - c. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.1.6.10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - (2a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 2.3 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)

di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)
---	---------------------------------

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2a) Dihapus.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri:

- a. berbentuk perseroan terbuka;
- b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)', dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

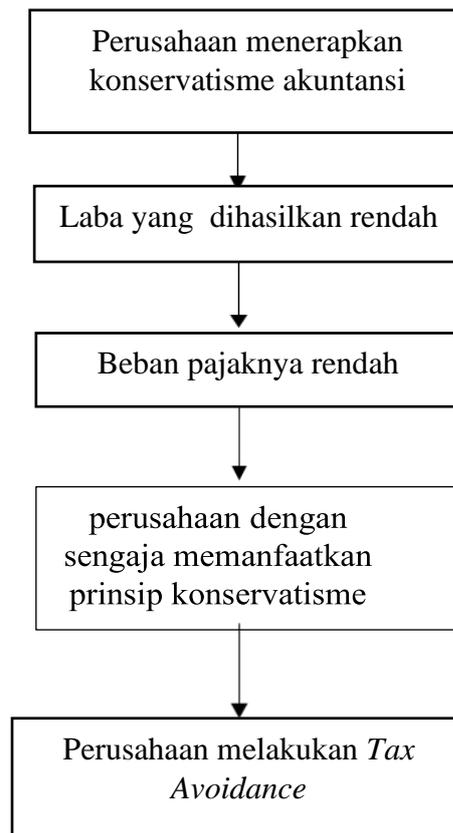
Menurut Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2016), Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Prinsip ini akan mempengaruhi laba perusahaan, karena beban-beban diakui lebih awal dibandingkan pendapatan akan menyebabkan laba perusahaan menjadi rendah sehingga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga rendah. (Mira dan Bornok Situmorang, 2021).

Normative beliefs berkaitan dengan konservatisme akuntansi, dimana manajer dalam menerapkan konservatisme dalam suatu perusahaan dapat mengelola laba dengan cara penerapan laba yang ketat sehingga laba yang dihasilkan rendah dan beban pajaknya akan rendah. Suatu perusahaan yang memiliki beban pajak yang rendah (Renaldi Alfarasi dan Dul Muid, 2022) Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa perusahaan dengan sengaja memanfaatkan prinsip konservatisme sebagai langkah melakukan *Tax Avoidance* (Natania Aurielle Gunarto dan Priyo Hari Adi, 2022)

Sejalan dengan penelitian Sarra, et a.l, (2017), NP Swandewi, N Noviyari (2020), I Windaryani, IK Jati (2020), B Situmorang (2021), V Alvionita, A Sutarjo, DL Silvera (2021), DK Pratiwi, A Djajanti (2022)

juga menyebutkan adanya pengaruh dari konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Konservatisme Akuntansi
terhadap *Tax Avoidance*.**



Gambar 2. 1

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Konservatisme Akuntansi
terhadap *Tax Avoidance***

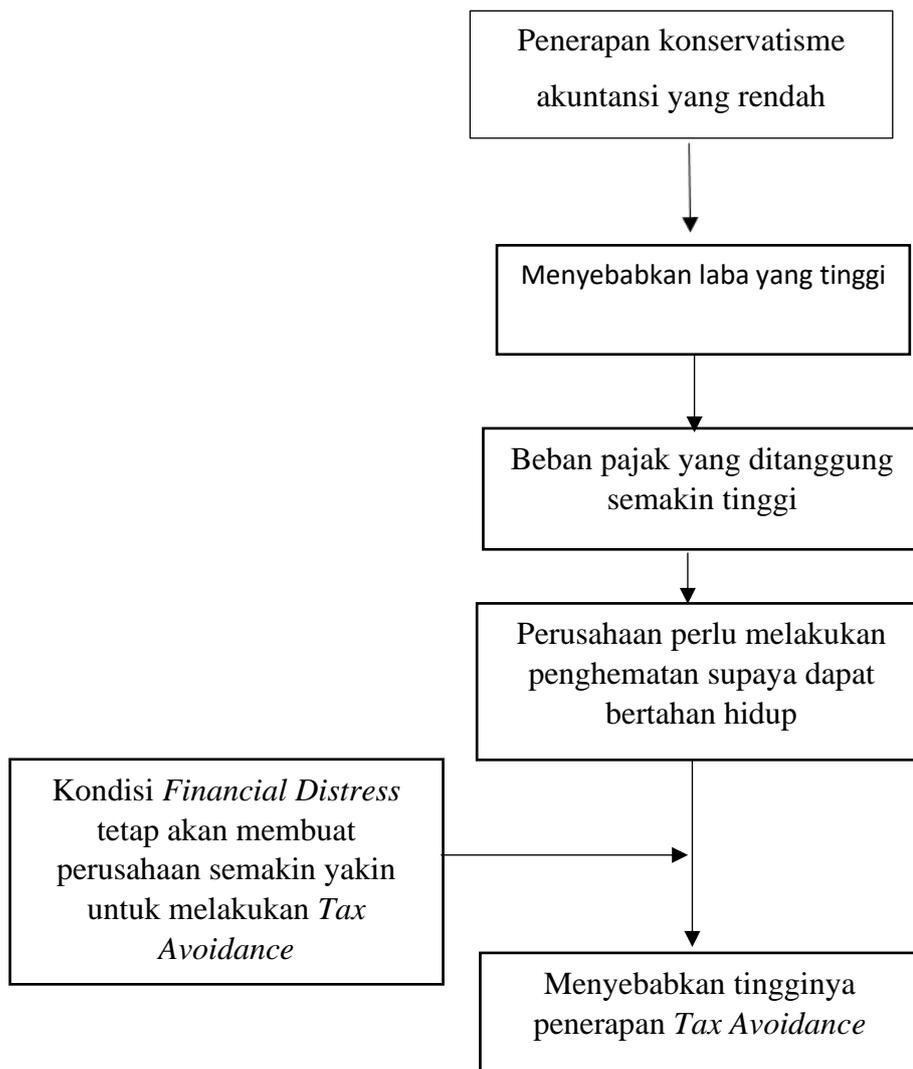
**2.2.2 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*
dengan Variabel *Financial Distress* sebagai Pemoderasi**

Konservatisme akuntansi diduga bukanlah variabel yang dapat berdiri sendiri dan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance* dinilai dapat dipengaruhi oleh hal lain. Windaryani & Jati (2020) dalam penelitiannya menyarankan untuk menambahkan

variabel *Financial Distress* (kesulitan keuangan) dalam mengukur *Tax Avoidance*. Terkait hubungan *Financial Distress* dan konservatisme akuntansi, Lawal & Hassan (2021) menyatakan bahwa kendala keuangan dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap efisiensi investasi secara signifikan.

Prinsip Konservatisme Akuntansi akan mempengaruhi laba perusahaan, karena beban-beban diakui lebih awal dibandingkan pendapatan akan menyebabkan laba perusahaan menjadi rendah sehingga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga rendah. (Mira dan Bornok Situmorang, 2021). Sebaliknya Penerapan konservatisme akuntansi yang rendah menyebabkan tingginya Penerapan *Tax Avoidance*, Kondisi *Financial Distress* tetap akan membuat perusahaan semakin yakin untuk melakukan *Tax Avoidance* karena beban yang ditanggung semakin besar. Perusahaan perlu melakukan penghematan supaya dapat bertahan hidup (Nadhifa & Arif, 2020). Sebagai variabel moderator, *Financial Distress* berperan sebagai auxiliary independent variable (variabel independent tambahan) untuk mengubah hubungan X terhadap Y (Wu & Zumbo, 2008). Lawal & Hasan (2021) menemukan bahwa kendala keuangan dapat menjadi moderator yang signifikan dalam hubungan konservatisme akuntansi (variabel independent) dan efisiensi investasi (variabel dependen) sehingga peneliti menduga bahwa peran moderasi tersebut juga berlaku untuk variabel dependen *Tax Avoidance*.

Kerangka Pemikiran Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* dengan Variabel *Financial Distress* sebagai Pemoderasi



Gambar 2. 4

Kerangka Pemikiran Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Financial Distress sebagai Pemoderasi

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H2: *Financial Distress* memperkuat pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.